

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Legitimasi merupakan sistem interaksi perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan kepada masyarakat, dimana perusahaan harus dapat menyesuaikan diri dengan sistem nilai dan budaya yang ditetapkan atau berlaku dimasyarakat dengan kata lain perusahaan harus memperhatikan norma – norma sosial dalam masyarakat, dalam teori legitimasi digambarkan dengan garis besar bahwasannya menempatkan persepsi dan pengakuan publik sebagai dorongan utama dalam melakukan pengungkapan suatu informasi didalam suatu laporan keuangan. Saat masyarakat dan perusahaan dapat bekerjasama dengan baik, maka akan terbangun legitimasi yang baik untuk perusahaan. Menurut Clarckson *et al* (2008), dalam Adriana, pengungkapan lingkungan perusahaan digunakan sebagai media penghubung antara perusahaan dengan masyarakat agar mendapatkan legitimasi atas pengungkapan lingkungan yang telah dilakukan perusahaan. Menurut Dowling dan Pfeffer (1975) dalam Adriana legitimasi merupakan suatu hal yang penting untuk organisasi, batasan-batasan yang ditekankan oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya dalam melakukan analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan.

Ghozali dan Chariri (2014) menyatakan bahwa hal yang mendasari teori legitimasi adalah “kontrak sosial” antara perusahaan dan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Perusahaan dikatakan memiliki legitimasi ketika sistem nilai perusahaan sejalan dengan sistem nilai masyarakat. Dengan melakukan pengungkapan salah satunya pengungkapan lingkungan untuk memberikan informasi yang lebih luas kepada masyarakat tentang kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sehingga keberadaan perusahaan dapat diterima oleh masyarakat Antari, (2018).

Jika nilai perusahaan berbeda dengan sistem penilaian dari masyarakat hal tersebut dapat menimbulkan konflik dan dapat membahayakan keberlangsungan perusahaan, sehingga dengan adanya legitimasi dari masyarakat perusahaan dapat menekan biaya-biaya yang tidak diperlukan akibat masyarakat setempat menolak suatu organisasi atau perusahaan perusahaan ditengah-tengah mereka. Dengan melakukan pengungkapan sosial, perusahaan merasa keberadaan dan aktivitasnya terlegitimasi.

Berdasarkan kajian tentang teori legitimasi dapat disimpulkan bahwa teori legitimasi menekankan suatu organisasi ataupun perusahaan harus berorientasi terhadap keberpihakan kepada masyarakat, dengan menunjukkan secara konsisten perusahaan telah beroperasi sesuai perilaku dan nilai sosial yang berlaku dimasyarakat dan hal ini dapat dicapai melalui pengungkapan (*disclosure*) yaitu dengan melaksanakan implementasi rill melalui pelaksanaan *corporate social responsibility* dalam laporan keuangan untuk merespon tekanan publik. Teori legitimasi menegaskan bahwa perusahaan terus berupaya memastikan bahwa mereka beroperasi dalam bingkai dan norma yang ada dalam masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan berada, berusaha memastikan bahwa aktivitas perusahaan diterima oleh pihak luar sebagai sesuatu yang “sah” dalam Paramitha dan Rohman (2014). Dalam teori legitimasi ini luas pengungkapan dalam suatu informasi dalam laporan keuangan perusahaan dipengaruhi oleh penempatan persepsi dan pengakuan publik menjadi pertimbangan utama.

### **2.1.2 Teori Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Theory*)**

Istilah *stakeholder* pertama kali diperkenalkan oleh *Stanford Research Institute* Freeman, (2008). Freeman menjelaskan bahwa *stakeholder* merupakan kelompok atau individu-individu yang dipengaruhi oleh tercapainya tujuan-tujuan organisasi dan pada gilirannya dapat mempengaruhi tercapainya tujuan tersebut. Selain itu, Chariri dan Ghozali, (2014) juga berpendapat bahwa perusahaan itu bukan merupakan entitas yang berdiri sendiri dan beroperasi untuk kepentingan sendiri tetapi perusahaan harus memberikan manfaat kepada para *stakeholder*.

*Stakeholder* yang dimaksud dalam teori ini adalah para pemanggu kepentingan baik pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal yang dapat mempengaruhi keberlangsungan suatu perusahaan (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Fokus utama dalam teori ini yaitu bagaimana perusahaan memonitor dan merespon kebutuhan para stakeholdernya Gray *et al* (1995) dalam Nugraha dan Juliarto.

Timbulnya *stakeholder theory* disebabkan suatu keadaan (hukum) yang memprioritaskan kepentingan pemegang saham dan sebaliknya, menomorduakan kepentingan pemasok, pelanggan, karyawan, dan masyarakat sekitarnya. Teori *stakeholder* mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan memerlukan dukungan para *stakeholder*, sehingga aktivitas perusahaan juga mempertimbangkan persetujuan dari *stakeholder*, pengungkapan lingkungan dan sosial kemudian dipandang sebagai dialog antara perusahaan dengan *stakeholder*. Tujuan utama dari teori *stakeholder* adalah membantu manajer korporasi mengerti lingkungan para stakeholder-nya, meningkatkan nilai dari aktifitas mereka, meminimalkan kerugian-kerugian bagi *stakeholder*. Beberapa alasan yang mendorong perusahaan perlu memperhatikan kepentingan para *stakeholder* diantaranya yaitu:

1. Isu lingkungan melibatkan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat yang dapat mengganggu kualitas hidup mereka.
2. Diera globalisasi ini menjadi tuntutan perusahaan menghasilkan produk-produk yang diperdagangkan harus bersahabat dengan lingkungan.
3. Kecenderungan para investor yang menanamkan modalnya lebih memilih perusahaan yang memiliki dan mengembangkan kebijakan dalam program lingkungan.
4. LSM dan para pecinta lingkungan semakin vokal dalam menyuarakan dan mengkritik perusahaan yang kurang peduli terhadap lingkungan.

Pada dasarnya pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan bertujuan untuk memperlihatkan kepada masyarakat aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Hal ini juga didukung dengan adanya Peraturan Pemerintah No 27 tahun (2012) dan Undang-Undang No. 32 tahun (2009) yang ditetapkan pemerintah mengenai hal izin lingkungan dan

tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, untuk memicu perusahaan melakukan kinerja lingkungan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Teori *stakeholder* lebih mempertimbangkan posisi para *stakeholder* yang dianggap *powerfull*, kelompok *stakeholder* inilah yang menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan dalam mengungkapkan atau tidak mengungkapkan suatu informasi dalam laporan keuangan.

### **2.1.3 Environmental Disclosure (Pengungkapan Lingkungan)**

*Environmental Disclosure* adalah pengungkapan didalam laporan tahunan yang menyangkut mengenai informasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup Suratno *et al* (2006). Menurut surat keputusan BAPEPAM No. Kep-38/MP/1996 menyebutkan bahwa jenis pengungkapan informasi dalam *annual report* dikategorikan menjadi dua jenis yaitu pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) dan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*).

Menurut Hendriksen dan Breda (2008) umumnya ada tiga konsep pengungkapan yang sering diusulkan yaitu :

1. *Adequate Disclosure* (pengungkapan yang cukup), didalamnya mencakup pengungkapan minimal yang harus dilakukan agar laporan keuangan tidak menyesatkan.
2. *Fair Disclosure* (pengungkapan yang wajar), pengungkapan ini secara wajar menunjukkan tujuan etis agar dapat memberikan perlakuan yang sama dan bersifat umum bagi semua pemakai laporan keuangan.
3. *Full Disclosure* (pengungkapan yang lengkap), pengungkapan yang didalamnya mensyaratkan perlunya penyajian semua informasi yang relevan. Namun bagi beberapa pihak pengungkapan secara menyeluruh diartikan sebagai penyajian informasi yang berlebihan sehingga hal ini tidak dapat dikatakan layak.

Pengungkapan lingkungan menurut Kementerian Lingkungan Hidup adalah suatu istilah yang sering digunakan oleh suatu instansi perusahaan maupun organisasi

untuk mengungkapkan data yang berhubungan dengan lingkungan, disahkan (diaudit) atau tidak, mengenai risiko lingkungan, dampak lingkungan, kebijakan, strategi, target, biaya, pertanggungjawaban, atau kinerja lingkungan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan berkaitan dengan informasi yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan dengan institusi atau organisasi (menlh.go.id).

*Global Reporting Initiative (GRI)* adalah standar yang biasanya digunakan oleh perusahaan dalam membuat *environmental disclosure*. GRI merupakan organisasi nirlaba internasional yang memiliki misi untuk menjadikan *sustainability report* menjadi praktik yang terstandar. *Sustainability reporting* memuat tentang mengenai pengungkapan kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial atau yang sering dikenal dengan konsep *Triple Bottom Line*. Istilah tripel bottom line dipopulerkan oleh John Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya *cannibals with forks, the tripel bottom line of twentieth century business*. Elkington memberi pandangan bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan haruslah memperhatikan 3P (*profit, people, and planet*). Selain mengejar *profit*, perusahaan juga mesti memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*), serta turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Pada gagasan tersebut, perusahaan perusahaan tidak lagi dihadapkan padatangung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu aspek ekonomi yang direfleksikan dalam kondisi finansialnya saja, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya Muh Arief efendi, (2008).

**Gambar 2.1 Konsep *Tripel Bottom Line***



Sumber : <https://sustain.wisconsin.edu/sustainability/triple-bottom-line/>

#### 2.1.4 *Environmental Performance* (Kinerja Lingkungan)

*Environmental performance* merupakan usaha-usaha yang dilakukan perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan terutama yang berkaitan dengan kegiatan atau aktivitas perusahaan itu sendiri. Usaha-usaha tersebut dapat berupa kegiatan reboisasi, penggunaan teknologi untuk mengurangi limbah, pengurangan penggunaan air dan masih banyak lagi. Antari, (2018).

Kinerja lingkungan dapat diukur melalui program peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (PROPER) program ini digalakan dibawah naungan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK). Tujuan PROPER adalah untuk mendorong perusahaan meningkatkan pengelolaan lingkungannya dan meningkatkan peran perusahaan dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup. Penilaian PROPER membantu perusahaan meningkatkan citra dihadapan para stakeholder, sebab PROPER menekankan penilaian pada konservasi sumber daya alam, sistem manajemen lingkungan, dan pelaksanaan CSR. Dengan perusahaan menjadi peserta PROPER secara tidak langsung perusahaan telah melakukan CSR dalam perusahaannya, perusahaan yang telah melakukan CSR mempunyai persentase lebih besar untuk *going concren* (berkelanjutan).

Kriteria yang digunakan untuk mengukur kinerja lingkungan dalam penelitian ini menggunakan PROPER karena dapat memudahkan dalam penggunaannya. Kemudahannya itu karena adanya tingkatan yang paling baik hingga yang paling buruk dalam kinerja perusahaan dan penilaiannya menggunakan simbol warna sehingga lebih mudah untuk dibaca dan dimengerti serta dipahami yaitu:

1. Emas : sangat sangat baik = 5
2. Hijau : sangat baik = 4
3. Biru : baik = 3
4. Merah : buruk = 2
5. Hitam : sangat buruk = 1

Dengan penilaian pemeringkatan dalam PROPER berdasarkan dari:

**Table 2.1**  
**Indikator Peringkat Emas**

<b>Aspek</b>	<b>Indikator</b>
Air	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program kerja konservasi penggunaan air.</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan air secara berkala.</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang digunakan.</li> <li>4. Melakukan upaya recycle.</li> <li>5. Melakukan upaya efisiensi penggunaan air baku secara konsisten.</li> </ol>
Udara/Energi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara.</li> <li>2. Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara.</li> <li>3. Mempunyai neraca penggunaan energi.</li> <li>4. Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive.</li> <li>5. Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon).</li> <li>6. Melakukan kegiatan pengurangan Gas Rumah Kaca.</li> <li>7. Melakukan efisiensi energi.</li> </ol>
Limbah B3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R untuk pengelolaan limbah B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R dengan inovasi teknologi.</li> </ol>
Limbah Padat Non B3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempunyai program 3R kegiatan pengelolaan Limbah Non B3.</li> <li>2. Melakukan upaya 3R limbah padat Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R</li> </ol>
Sistem Manajemen Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Audit lingkungan secara keseluruhan dan berkala.</li> <li>2. Memperoleh sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dari lembaga akreditasi lebih dari satu kali.</li> <li>3. Telah mendapatkan peringkat PROPER Hijau selama dua kali berturut-turut.</li> </ol>
<i>Community Development</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sehingga dapat mandiri, seperti adanya usaha mandiri masyarakat.</li> <li>2. Mendapatkan penghargaan <i>Corporate Social Responsible (CSR)</i> dari lembaga kredibel lainnya.</li> </ol>

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup

**Table 2.2**  
**Indikator Peringkat Hijau**

<b>Aspek</b>	<b>Indikator</b>
Air	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan audit penggunaan air.</li> <li>2. Mempunyai neraca penggunaan air untuk seluruh air yang</li> </ol>

	<p>digunakan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan upaya 3R untuk air limbah.</li> <li>Melakukan upaya efisiensi penggunaan air.</li> </ol>
Udara/Energi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mempunyai program konservasi energi dan pengurangan emisi udara.</li> <li>Melakukan audit penggunaan energi dan pengendalian emisi udara.</li> <li>Mempunyai neraca penggunaan energi.</li> <li>Melakukan kegiatan pengurangan emisi fugitive.</li> <li>Melakukan kegiatan pengurangan penggunaan BPO (bahan perusak ozon).</li> <li>Melakukan kegiatan pengurangan Gas Rumah Kaca.</li> <li>Melakukan efisiensi energi.</li> <li>Mempunyai neraca penggunaan energi.</li> </ol>
Limbah B3	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mempunyai program 3R untuk pengelolaan limbah B3.</li> <li>Melakukan upaya 3R dengan inovasi teknologi.</li> </ol>
Limbah Padat Non B3	Melakukan upaya 3R minimal Limbah Non B3 yang berpotensi untuk dilakukan 3R berdasarkan baseline data.
Sistem Manajemen Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Audit Lingkungan secara keseluruhan.</li> <li>Memiliki sertifikasi sistem manajemen lingkungan (SML) oleh lembaga akreditasi atau lembaga lainnya.</li> </ol>
<i>Community Development</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memberikan bantuan ataupun sumbangan rutin untuk pelaksanaan kegiatan sosial kepada masyarakat disekitar lokasi.</li> <li>Tidak memiliki permasalahan sosial dengan masyarakat sekitar.</li> </ol>

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup

**Tabel 2.3**  
**Indikator Peringkat Biru**

<b>Aspek</b>	<b>Indikator</b>
AMDAL	Melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan RKL/RPL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan dan persyaratan AMDAL.
Air	<ol style="list-style-type: none"> <li>Semua outlet dipantau,</li> <li>Semua parameter dipantau sesuai dengan Baku Mutu yang berlaku.</li> <li>Jumlah data yang dipantau 100 % sesuai dengan kewajiban pemantauan yang diatur sesuai peraturan, atau perijinan yang berlaku untuk setiap outlet dan setiap parameter,</li> <li>Jumlah data yang memenuhi baku mutu 100 % sebagaimana ditetapkan dalam peraturan menteri/gubernur atau ijin yang ditetapkan oleh Bupati (mengacu ke butir 2).</li> <li>Memenuhi semua ketentuan teknis.</li> </ol>
Udara/Energi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bagi sumber emisi yang berjumlah <math>\leq 5</math> cerobong, semua cerobong harus dilakukan pemantauan.</li> </ol>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Bagi sumber emisi yang berjumlah &gt; 5 cerobong, dapat dilakukan pemantauan minimal 80% dari jumlah total cerobong.</li> <li>3. Semua parameter dipantau sesuai dengan Baku Mutu yang berlaku, bagi industri yang belum memiliki Baku Mutu dipantau dengan 3 parameter kunci,</li> <li>4. Jumlah data yang dipantau 100 %,</li> <li>5. Memenuhi seluruh ketentuan teknis dalam penempatan titik sampling dan sarana pendukungnya.</li> <li>6. Menyampaikan pelaporan 100% data pemantauan yang dipersyaratkan (Data manual setiap 6 bulan)</li> <li>7. 100 % data pemantauan memenuhi BMEU6 yang dipersyaratkan (data manual).</li> </ol>
Limbah B3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi &gt;95 % ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin dimiliki oleh perusahaan<sup>7</sup>.</li> <li>2. Kinerja PLB3 &gt;95 % dari total LB3 yang dihasilkan yang tercatat dalam neraca limbah B3.</li> <li>3. Melakukan upaya 3R (Reduce, Reuse, Recycle).</li> <li>4. Telah menyelesaikan upaya clean-up open dumping &amp; open Burning dan atau upaya lanjut yang telah disetujui oleh KLH.</li> </ol>

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup.

**Tabel 2.4**  
**Indikator Peringkat Merah**

<b>Aspek</b>	<b>Indikator</b>
AMDAL	Melaksanakan < 50% kegiatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dalam AMDAL.
Air	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memantau seluruh outlet dan seluruh parameter yang diwajibkan, atau parameter kunci bagi industry yang tidak memiliki baku mutu spesifik, dan jumlah data pemantauan 100 % tetapi terdapat kurang dari tiga data (&lt; 2) per tahun melebihi baku mutu &gt;500%,</li> <li>2. Satu kali pemantauan oleh KLH per tahun menunjukkan parameter melebihi baku mutu &gt;500 %.</li> <li>3. Masih ditemukan persyaratan teknis utama yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan pengelolaan air yang relevan maupun perijinan.</li> </ol>
Udara/Energi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak semua cerobong dipantau, dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jika jumlah cerobong &lt; 5, kurang dari 3 cerobong yang dipantau,</li> <li>b. jika jumlah cerobong &gt;5, hanya memantau &lt; 60 % dari total cerobong,</li> <li>c. Cerobong yang dipantau tidak mewakili semua tipe sumber emisi.</li> </ol> </li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tidak semua parameter dipantau sesuai dengan Baku Mutu yang berlaku, atau bagi industri yang belum memiliki Baku Mutu tidak memantau 3 parameter kunci,</li> <li>3. Jumlah data per parameter untuk setiap tipe sumber emisi yang dipantau &lt;80 %,</li> <li>4. Data per parameter untuk setiap tipe sumber emisi dipantau dan memenuhi baku mutu &lt;80 %,</li> <li>5. Tidak memenuhi ketentuan teknis utama dalam penempatan titik sampling dan sarana pendukungnya.</li> </ol>
Limbah B3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi <math>50\% \leq - &lt; 75\%</math> ketentuan pengelolaan limbah B3 yang wajib dilakukan sesuai dengan izin yang dimiliki oleh perusahaan.</li> <li>2. Kinerja PLB3 &lt;50% dari total limbah B3 yang dihasilkan yang tercatat dalam Neraca LB3.</li> <li>3. Melakukan upaya 3R.</li> <li>4. Sedang melakukan upaya cleanup dan atau pengelolaan lebih lanjut namun belum sesuai dengan rencana yang sudah disepakati.</li> </ol>

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup.

**Tabel 2.5**  
**Indikator Peringkat Hitam**

Aspek	Indikator
AMDAL	Tidak memiliki AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL.
Air	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat outlet yang tidak pernah dipantau.</li> <li>2. Terdapat &gt; 3 data pemantauan per tahun yang melebihi baku mutu &gt;500%.</li> <li>3. Dua kali pemantauan oleh KLH per tahun menunjukkan parameter melebihi baku mutu &gt;500 %,</li> <li>4. Ditemukan bypass, atau pembuangan air limbah langsung ke lingkungan tanpa dilakukan pengelolaan.</li> <li>5. Seluruh persyaratan teknis pengelolaan air limbah tidak memenuhi peraturan.</li> </ol>
Energi/Udara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak pernah melakukan pemantauan,</li> <li>2. Dari dua kali pemantauan per tahun terdapat 2 data menunjukkan parameter melebihi baku mutu &gt;500, atau melakukan satu kali pemantauan pertahun terdapat parameter &gt; 500%.</li> <li>3. Membuang emisi tidak melalui cerobong.</li> </ol>
Limbah B3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan kegiatan open dumping dan open burning.</li> <li>2. Tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 dan atau menyerahkan limbah B3 ke pihak ke 3 yang tidak memiliki izin dari KLH.</li> <li>3. Melakukan open dumping lebih dari satu kali.</li> </ol>

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup.

### 2.1.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan mendeskripsikan skala yang menentukan besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan biasanya ditentukan oleh besaran asset yang dimiliki perusahaan tersebut. Dalam teori legitimasi dan stakeholder, perusahaan besar lebih terlihat aktivitasnya dibandingkan dengan perusahaan kecil sehingga tuntutan dari stakeholder dan masyarakat akan semakin besar, Nugraha dan Juliarto (2015). Adriana (2017) menyatakan bahwa aset yang dimiliki perusahaan merupakan sumber yang diharapkan agar dapat bermanfaat bagi perusahaan dimasa depan, jumlah aset yang besar hanya dimiliki oleh perusahaan yang besar pula. Menurut Badan Standarisasi Nasional (DSN) kategori perusahaan dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

1. Kriteria Usaha Kecil

memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000.

2. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000.

3. Perusahaan Besar

Perusahaan dapat dikategorikan perusahaan menengah apabila memiliki kekayaan bersih lebih dari 10.000.000.000 tidak termasuk bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 50.000.000.000.

semakin besar ukuran suatu perusahaan maka akan semakin menjadi pusat perhatian halayak luas. Dalam Nugraha dan Juliarto (2015) menyatakan bahwa perusahaan dengan jumlah aset besar akan mendapatkan tekanan yang diberikan oleh publik dan stakeholder mempunyai ekspetasi yang tinggi mengenai praktik manajemen karbon, untuk menjawab tekanan tersebut cara yang ditempuh oleh

perusahaan adalah dengan melakukan pengungkapan sosial lingkungan, untuk memperoleh dukungan dan legitimasi dari masyarakat.

### **2.1.6 Profitabilitas**

Profitabilitas merupakan tolok ukur perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasional perusahaan. Semakin tinggi rasio profitabilitas suatu perusahaan maka semakin tinggi pula laba yang dapat dihasilkan, hal ini akan dapat menunjukkan kemungkinan yang baik dimasa yang akan datang.

Nugraha dan Juliarto (2015) menyatakan bahwa isu lingkungan merupakan hal yang sensitive sehingga dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit. Adriana (2017) menyatakan jika profitabilitas dikaitkan dengan teori legitimasi maka dapat dikatakan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan lebih mudah untuk menjawab tuntutan yang dilaukan oleh masyarakat. Serta perusahaan dengan memiliki profitabilitas yang tinggi lebih mampu dalam melakukan pengungkapan, jika dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah.

### **2.1.7 Leverage**

Leverage merupakan rasio keuangan yang mendeskripsikan hubungan antara utang perusahaan terhadap aktiva maupun modal milik perusahaan. Dalam penelitian ini leverage diukur menggunakan *debt to asset ratio*, rasio ini menunjukkan proporsi aset perusahaan yang dibiayai melalui utang. Leverage digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya, dengan demikian leverage juga mencerminkan tingkat risiko keuangan perusahaan, semakin tinggi leverage suatu perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat risiko keuangannya. Darlis *et al*, (2009) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat rasio leverage suatu perusahaan maka semakin luas pengungkapan risiko maupun informasi yang harus diungkapkan sebagai bentuk

tanggung jawab terhadap kreditor, termasuk informasi mengenai pengungkapan tanggung jawab lingkungan.

Berdasarkan uraian diatas maka tingkat leverage dapat dijadikan tolak ukur pertimbangan bagi kreditor dalam mengambil keputusan untuk meminjamkan dana atau tidak terhadap suatu perusahaan.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.6**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Nama Peneliti dan Tahun Penelitian</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Bunga Widia Paramitha (2014)	Variabel Independen : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ukuran perusahaan</li> <li>- Profitabilitas</li> <li>- Umur perusahaan</li> <li>- <i>Leverage</i></li> </ul> Variabel Dependen : <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Environmental Disclosure</i></li> </ul>	Variabel ukuran perusahaan dan <i>leverage</i> berpengaruh terhadap <i>environmental disclosure</i> , sedangkan variabel profitabilitas dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>environmental disclosure</i>
Dicko Eka Bimantara Nugraha dan Agung Juliarto (2015)	Variabel independen : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ukuran perusahaan</li> <li>- Tipe industri</li> <li>- Profitabilitas</li> <li>- Leverage</li> <li>- Kinerja Lingkungan</li> </ul> Variabel dependen : <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Environmental Disclosure</i></li> </ul>	Variabel ukuran perusahaan, tipe industri, kinerja lingkungan memiliki pengaruh terhadap <i>Environmental Disclosure</i> , sedangkan variabel profitabilitas dan leverage tidak memiliki pengaruh terhadap

		<i>Environmental Disclosure.</i>
Heni Nurani Hartikayanti, M. Ryan Trisyardi & ER Budi Saptono	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Firm Size</i></li> <li>- <i>Profitability</i></li> <li>- <i>Type of Industry</i></li> <li>- <i>Foreign Ownership</i></li> </ul> <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Environmental disclosure</i></li> </ul>	Variabel tipe industri berpengaruh terhadap praktik <i>environmental disclosure</i> , sedangkan ukuran perusahaan, profitabilitas dan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap <i>environmental disclosure</i> .
Ida Ayu Putu Oki Yacintya Dewi & Gerianta Wirawan Yasa (2017)	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ukuran perusahaan</li> <li>- Profitabilitas</li> <li>- Tipe industri</li> <li>- Kinerja lingkungan</li> </ul> <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Environmental disclosure</i></li> </ul>	Variabel ukuran perusahaan, Tipe industri, Kinerja lingkungan berpengaruh terhadap <i>environmental disclosure</i> sedangkan variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>environmental disclosure</i>
Jane Adriana (2017)	<p>Variabel Independen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Environmental Performance</i></li> <li>- Ukuran Perusahaan</li> <li>- Profitabilitas</li> </ul> <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Environmental Disclosure.</i></li> </ul>	Variabel <i>environmental performance</i> , ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>environmental disclosure</i> , sedangkan profitabilitas tidak memiliki pengaruh

		terhadap <i>environmental disclosure</i> .
Dedi Putra & Indah Lutfia Utami (2017)	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Environmental Performance</i></li> </ul> <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Environmental Disclosure</i></li> <li>- <i>Economic Performance</i></li> </ul>	Variabel <i>environmental performance</i> berpengaruh secara signifikan terhadap <i>environmental disclosure</i> dan <i>economic performance</i> .
Ratri Yuni Antari (2018)	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Environmental performance</i></li> <li>- Profitabilitas</li> <li>- Ukuran perusahaan</li> <li>- Proporsi dewan komisaris independen</li> </ul> <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Environmental disclosure</i>.</li> </ul>	<i>environmental performance</i> , ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap <i>environmental disclosure</i> . Sedangkan untuk variabel profitabilitas dan proporsi dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap <i>environmental disclosure</i> .
Hananty Anantya Putri (2019)	<p>Variabel Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Environmental performance</i></li> <li>- Ukuran perusahaan</li> <li>- Profitabilitas</li> </ul> <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Environmental disclosure</i></li> </ul>	<i>environmental performance</i> , ukuran perusahaan, profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik <i>environmental disclosure</i>

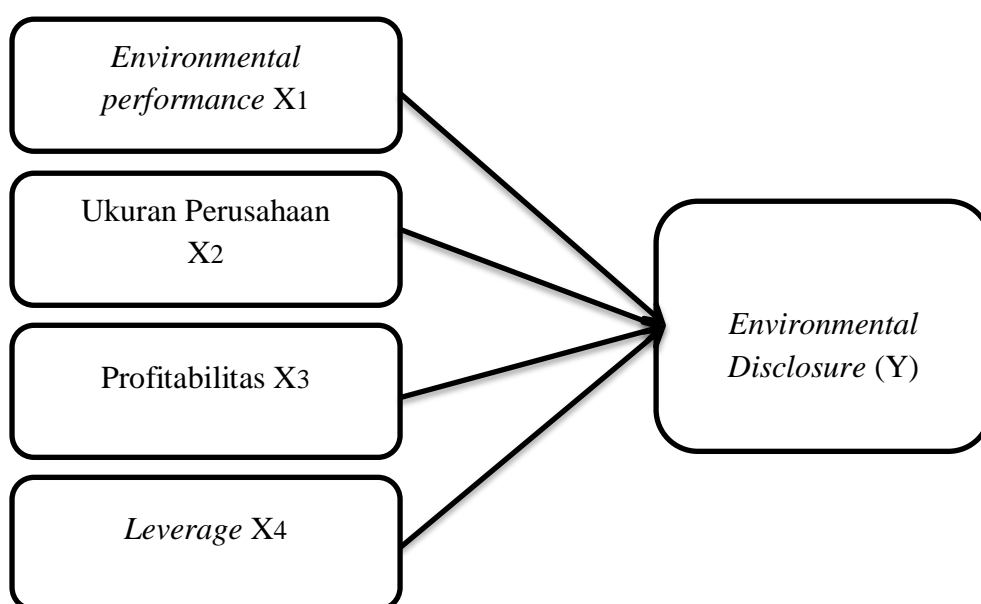
Sumber : Data diolah

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Isu permasalahan lingkungan menjadi sorotan akibat adanya ketidaksesuaian antara prosedur pengelolaan lingkungan dengan apa yang terjadi dilapangan. Sehingga pemerintah melalui kementerian lingkungan hidup (KLH) membuat Program Penilaian Peringkat Kinerja Pengelolaan Lingkungan (PROPER) sebagai indikator pengukur apakah suatu perusahaan telah melaksanakan pengelolaan lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam sesuai peraturan yang berlaku. Kerangka pemikiran dirancang untuk dapat lebih memahami gambaran mengenai praktik pengungkapan *inveromental disclosure* yang dilakukan oleh suatu perusahaan.

Perusahaan dengan tingkat *environmental disclosure* yang tinggi merupakan “good news” bagi para investor karena hal tersebut mengindikasikan perusahaan memiliki kinerja lingkungan yang baik secara otomatis akan membangun citra perusahaan yang baik dimata stakeholder dan berdampak pada fluktuasi harga saham perusahaan serta memiliki persentase lebih tinggi sebagai perusahaan yang berkelanjutan.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**





## 2.4 Hipotesis Penelitian

### 2.4.1 Pengaruh Environmental Performance Terhadap Praktik *Environmental Disclosure*.

*Environmental performance* dalam penelitian ini diukur melalui program peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (PROPER). Dalam penelitian terbaru yang dijadikan acuan dalam penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Putri (2019), *environmental performance* memiliki pengaruh positif terhadap praktik *environmental disclosure*, hal ini sejalan dengan teori legitimasi sebab perusahaan dengan aktivitas kegiatan lingkungan yang lebih banyak cenderung akan lebih mengungkapkan kinerja lingkungannya dalam *annual report* (laporan tahunan) yang diterbitkan oleh perusahaan, hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan citra perusahaan dimata masyarakat ataupun *stakeholder*. Sedangkan menurut teori stakeholder demi menggapai tujuan bersama perusahaan harus bekerjasama dan memiliki hubungan yang harmonis dengan para stakeholdernya, pengungkapan sosial lingkungan menjadi salah satu dayatarik perusahaan untuk mendapatkan calon investor baru yang tidak hanya mementingkan profit tetapi juga peduli terhadap lingkungan, dengan harapan dapat meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan Berdasarkan uraian hipotesis diatas maka dapat ditarik kesimpulan

H1: *environmental performance* berpengaruh terhadap praktik *environmental disclosure*.

### 2.4.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Praktik *Environmental Disclosure*

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari skala besaran aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan, jumlah penjualan, rata-rata total aset dan rata-rata total penjualan.

Dalam penelitian terbaru yang dilakukan oleh Putri (2019), ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik *environmental disclosure*, hal ini sejalan dengan apa yang dimuat dalam teori legitimasi sebab semakin besar

ukuran perusahaan maka semakin banyak pihak yang mengawasi dan perusahaan menjadi pusat perhatian oleh masyarakat sekitar. Hal tersebut mendorong perusahaan untuk lebih peka terhadap isu lingkungan. Sedangkan berdasarkan teori *stakeholder* para pemangku kepentingan memiliki kesempatan untuk mengontrol sumber daya perusahaan. Interaksi perusahaan besar dengan masyarakat cenderung lebih banyak dan berpengaruh signifikan secara ekonomi dan organisasi. Perusahaan besar lebih terlihat oleh media, pembuat kebijakan, regulator dan juga masyarakat sehingga membuat perusahaan menghadapi tekanan politis dan mendapatkan peraturan ketat dari pihak eksternal agar perusahaan lebih peduli dengan masalah lingkungan termasuk dalam melakukan pengungkapan lingkungan Brammer dan Pavelin, (2008). Berdasarkan uraian hipotesis diatas maka dapat ditarik kesimpulan

H2 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap praktik *Environmental Disclosure*

#### **2.4.3 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Praktik *Environmental Disclosure***

Profitabilitas merupakan tolok ukur perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasional perusahaan. Isu mengenai masalah lingkungan merupakan hal yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profitabilitas (Nugraha dan Juliarto, 2015). Dalam penelitian terbaru yang dilakukan oleh Putri (2019), memperoleh kesimpulan adanya hubungan positif antara rasio profitabilitas terhadap praktik *environmental disclosure*. Perusahaan dengan tingkat rasio profitabilitas yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut menghasilkan laba yang besar pula, hal ini berarti perusahaan memiliki tanggungjawab yang lebih terhadap para stakeholder dan tekanan yang diterima perusahaan semakin besar dari para aktivis ataupun masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitar. Sehingga dengan besarnya rasio profitabilitas suatu perusahaan maka kepedulian perusahaan terhadap lingkungan juga meningkat serta hal ini akan berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan. Dari uraian hipotesis diatas maka peneliti menarik kesimpulan bahwa

H3 : Rasio Profitabilitas Berpengaruh Terhadap Praktik *Environmental Disclosure*.

#### **2.3.4 Pengaruh Leverage Terhadap Praktik *Environmental Disclosure*.**

*Leverage* merupakan gambaran aktiva milik perusahaan yang berasal dari dana yang dipinjam perusahaan kepada kreditur. *leverage* juga merupakan bagian dari kinerja keuangan yang fundamental. Peningkatan tingkat rasio *leverage* menandakan butuhnya kucuran dana perusahaan, selain itu tingginya tingkat rasio *leverage* juga merupakan ketergantungan perusahaan terhadap utang dan dapat berpotensi menciptakan risiko terhadap keberlangsungan hidup perusahaan.

Perusahaan dengan rasio *leverage* yang lebih tinggi akan lebih banyak mengungkapkan informasi karena besarnya biaya keagenan akibat struktur modal perusahaan dengan tingkat *leverage* yang relatif besar. Selain itu tambahan informasi juga diperlukan untuk menghilangkan keraguan pemegang obligasi terhadap dipenuhinya hak – hak mereka sebagai kreditur. Darlis *et al*, (2009) oleh karena itu perusahaan dengan tingkat rasio *leverage* yang tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas dibandingkan dengan perusahaan dengan tingkat rasio *leverage* yang lebih rendah, termasuk informasi mengenai pengungkapan tanggung jawab lingkungan.

Dari uraian hipotesis diatas maka peneliti menarik kesimpulan bahwa

H4 : Rasio *Leverage* Berpengaruh Terhadap Praktik *Environmental Disclosure*.